

905

TINJAUAN DAN PERMASALAHAN ANGKATAN KERJA
INDONESIA BAGIAN TIMUR :
1980 - 1990



Oleh :

A N W A R
STB : 87 01 200



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl terima	15-01-94
Asal dari	-
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Marga	1 (satu) eksemplar
No. Inventaris	9405 0905
No. Klas	

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1993

TINJAUAN DAN PERMASALAHAN ANGKATAN KERJA
INDONESIA BAGIAN TIMUR ;
1980 - 1990

Oleh :

A N W A R

STB : 87 01 200

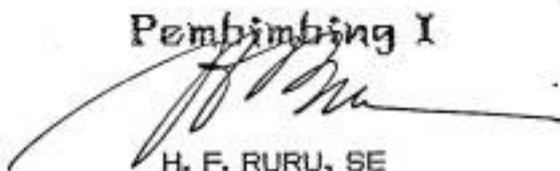
Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan

Pada

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

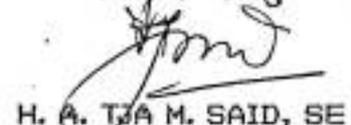
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



H. F. RURU, SE

Pembimbing II



H. A. Tj. M. SAID, SE

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiem.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhaanuhu Wataata atas berkah, rahmat, dan hinayah-Nyalah yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan dan Permasalahan Angkatan Kerja di Indonesia Bagian Timur : 1980 - 1990", dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat akademis yang telah ditentukan terhadap mahasiswa tingkat sarjana Lengkap dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Studi Pembangunan Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya upaya untuk menyajikan suatu karya ilmiah yang diharapkan, namun penulis sendiri memaklumi dan menyadari bahwa keberadaan sekripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, baik berupa materi, tata-bahasa amaupun cara penyusunannya sebagai salah satu karya ilmiah yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : karena kurangnya literatur dan bahan pustaka lainnya, serta keterbatasan memperoleh data yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam skripsi ini. Di

samping faktor yang paling penting adalah keterbatasan kemampuan penulis.

Dengan demikian, saran-saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai kalangan, penulis sangat mengharapkan untuk mengisi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam tulisan ini.

Berkat selesainya skripsi ini, maka tiada kata pengharagaan yang terindah dan ucapan terima kasih yang tak terbatas untuk kupersembahkan kepada Ayahanda Lahadi (almarhum), Ibunda Idalle dan Kakanda Harmawati, atas segala kasih sayang dan doa mereka serta pengorbanan yang tulus dan ikhlas, baik berupa materil maupun moril dalam mengasuh, mendidik dan mendoakan keselamatan serta keberhasilan penulis.

Penulis juga mengahaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pengahargan yang setinggi-tingginya, atas segala sumbangsinya, baik moril maupun materil kepada :

1. Drs. H.F. Ruru dan Dra. H.A. Tja M. Said, sebagai pembimbing I dan II yang telah bersedia melonggarkan waktu diantara kesibukan-kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesai skripsi ini.
2. Drs. Nuhun Ahmad, MA. dan Dra. Laly Djauhariah S, Ms., sebagai ketua dan sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Hasa-

nuddin, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan kepada penulis.

3. Prof. Dr. H.A. Karim Saleh dan Drs. H. Suudi Sa'na, Ms. sebagai Dekan dan Pembantu Dekan II, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada instansi yang terkait dengan penulisan ini.
4. Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA., Rektor Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
5. Para dosen, asisten dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, atas segala bantuan, bimbingan dan pelayanan yang diberikan.
6. Kepala Kantor Biro Pusat Statistik Perwakilan Sulawesi Selatan beserta stafnya yang begitu ramah dan bijaksana menerima penulis untuk mengadakan penelitian di tempat beliau, sehingga semua data yang penulis butuhkan dapat terkumpulkan.
7. Semua rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Penulis juga persembahkan terima kasih pada semua kerabat penulis yang telah membantu baik pada saat mengikuti kegiatan akademik pada waktu masih kuliah maupun pada saat menyelesaikan skripsi ini.

Kesemuanya ini, penulis hanya memohon keridhoan Allah SWT, semoga jasa-jasa baik yang diberikan itu mendapat pahala yang berlipat ganda dan senantiasa mendapat perlindungan disisi-Nya, Amin.

Ujung Pandang, April 1993

Penulis

A N W A R

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.1.1 Rumusan Masalah	5
I.1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan....	6
I.2 Landasan Teoritik	7
I.2.1 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik/Konseptual	7
I.2.2 Hypotesis	9
I.3 Tata Urut Isi Pembahasan	9
BAB II. METDDOLOGI	
2.1 Lokasi Penelitian	11
2.2 Sumber Data	11
2.3 Model Analisis	12
2.4 Pembatasan Unit Observasi dan Analisis	14
BAB III. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
3.1 Profil Wilayah IBT Menurut Propinsi ...	27

3.2 Tinjauan Demografi	34
3.2.1 Jumlah Penduduk Indonesia Bagian Timur	34
3.2.2 Jumlah dan Perkembangan Tenaga Kerja	36
3.2.3 Jumlah dan Perkembangan Angkatan Kerja	38
3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	38
3.3 Tingkat Pendidikan	43

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1 Elastisitas Kesempatan Kerja Indonesia Bagian Timur.....	52
4.1.1 Kesempatan Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja	52
4.1.2 Pertumbuhan PDRB Indonesia Bagian Timur	57
4.1.3 Elastisitas Kesempatan Kerja Indonesia Bagian Timur	58
4.2 Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Bagian Timur.....	66
4.3 Target Pertumbuhan Ekonomi Untuk Menurunkan Pengangguran dan Meningkatkan Tingkat Pendapatan	71

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN	85
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
3.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia Bagian Timur 1980 - 1990	34
3.2 Komposisi penduduk Indonesia Bagian Timur menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 1990	36
3.3 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Per Tahun Indonesia Bagian Timur 1980 - 1990	37
3.4 Jumlah dan laju pertumbuhan angkatan kerja Indonesia Bagian Timur 1980 - 1990	38
3.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja IBT Menurut Propinsi 1980 dan 1990	42
3.6 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk IBT Berumur 10 tahun ke atas Yang Pernah Sekolah dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	50
4.1 Jumlah Angkatan Kerja Yang Sedang Bekerja Dan Yang Masih Menganggur tahun 1990	56
4.2 Elastisitas Kesempatan Kerja di IBT Tahun 1980 - 1990	66
Lampiran 1 Jumlah Produk Domestik Bruto dan Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Bagian Timur	85

BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa akan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan makin lama makin maju apabila dipenuhi sejumlah syarat pokok, diantaranya adalah sumber daya manusia cukup banyak dan mempunyai kemampuan yang cukup besar yang dapat menggerakkan semua kegiatan dalam pembangunan secara serasi dan terpadu.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, antara lain dengan mengutamakan pembangunan yang dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutu gizi, memperluas pasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan kerjaa serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat tercipta manusia-manusia pembangunan yang tangguh, berbudi luhur, cukup trampil percaya diri sendiri dan bersemangat membangun.

Selanjutnya lebih jauh digariskan bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka perlu perluasan kesempatan kerja yang merupakan kebutuhan yang paling mendesak untuk menampung perkembangan tenaga kerja. Oleh karena itu perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan langkah yang menyeluruh dan terpadu untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, baik yang bersifat umum, sektoral, regional maupun yang bersifat khusus. Langkah yang bersifat umum meliputi antara lain kebijaksanaan produksi, investasi, fiskal, moneter, perdagangan harga upah serta berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan latihan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah yang bersifat sektoral antara lain kebijaksanaan pembangunan dibidang industri, pertanian dan jasa yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja sebesar mungkin, langkah-langkah yang bersifat regional antara lain upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di masing-masing daerah. Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan padat karya dan lain-lain. Kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja perlu menjangkau setiap warga negara dan benar-benar diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan terciptanya angkatan kerja yang tangguh dan siap bekerja sehingga

dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja dalam pembangunan ini. Keseluruhan kebijaksanaan tersebut di atas ditujukan untuk memperluas lapangan kerja baru yang sepadam dengan pertumbuhan angkatan kerja serta untuk mengurangi pengangguran yang ada dengan mempercepat laju pertumbuhan lapangan kerja khusus di luar sektor pertanian.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian pengembangan sumber daya manusia, diarahkan pada peningkatan harkat martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri. Pembangunan ketenaga kerjaan merupakan upaya yang bersifat menyeluruh disemua sektor daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu kemampuan serta perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, pembangunan sektoral dan regional perlu mengusahakan terciptanya lapangan kerja yang seluas mungkin. Demikian pula perlu terus ditingkatkan langkah-langkah diberbagai sektor dan daerah secara terpadu untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam rangka memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia maka dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan pada perluasan lapangan kerja, pembinaan dan pengemba-

ngan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat serta meningkatkan kemampuan penduduk untuk meningkatkan sumber kekayaan alam dan menanggulangi keadaan-keadaan atau masalah yang mendesak.

Dalam hubungan ini berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral perlu diserasikan potensi dan permasalahan masing-masing daerah. Salah satu kebijaksanaan yang paling nampak adalah tingkat pendidikan sudah mengalami kemajuan dimana prosentase penduduk yang tidak tamat sekolah dasar yang mencari pekerjaan telah menurun.

Namun demikian dimensi dari masalah kesempatan kerja mempunyai jangkauan luas dari pada hanya kekurangan kesempatan kerja, pemanfaatan yang kurang dan produktivitas kerja yang rendah dari mereka yang bekerja dengan jam kerja yang lama. Masalah kesempatan kerja juga meliputi perbedaan yang makin besar antara aspirasi serta jenis pekerjaan disatu pihak dan kesempatan kerja di lain pihak. Masalah ini berikuk pada tenaga kerja mudah terdidik baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di perkotaan. Secara khusus, makin dihindarinya pekerjaan kasar dan pekerjaan tani sebagai sistem yang berorientasi pada pekerjaan halus yang sangat membatasi usaha-usaha negara miskin dalam melakukan akselerasi pembangunan nasionalnya.

Dalam era pembangunan ini, khususnya di Indonesia Bagian Timur jumlah angkatan kerja pada tahun 1990 ada se-

kitar 9.431.197 orang. Apabila dapat dibina kemampuannya dan diserasikan gerak langkahnya merupakan tenaga yang sangat besar dan dapat menimbulkan pasar kerja yang baru.

Dengan dilatarbelakangi pola pemikiran dan pertimbangan di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisa tinjauan dan permasalahan angkatan kerja di Indonesia Bagian Timur yang lebih banyak membahas mutu angkatan kerja yang diperlukan dalam menghadapi era pembangunan ini. Maka dengan segala keyakinan, bahwa aspek mutu angkatan kerja yang baik sangat mempengaruhi pasar tenaga kerja. Dalam hal ini penulis memberanikan diri menyusun skripsi dengan judul :Tinjauan Dan Permasalahan Angkatan Kerja Di Indonesia Bagian Timur : 1980-1990.

1.1.1 Rumusan Masalah

Berkisar uraian di atas maka timbul berbagai masalah, terutama di daerah penelittian yang memerlukan perhatian dan mencari jalan keluar pemecahannya. Adapun masalah yang dimaksud adalah *di samping jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat dari tahun ketahun juga masalah mutu angkatan kerja yang rendah serta rendahnya tingkat pertumbuhan Producc Domestic Regional Bruto (PDRB).*

1.1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

- Tujuan Penulisan :

1. Membandingkan angkatan kerja dan tenaga kerja sehingga dapat memberikan gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Memberikan gambaran angkatan kerja yang berada di Indonesia Bagian Timur mengenai tingkat produktifitasnya.
3. Meninjau lebih jauh masalah-masalah angkatan kerja dalam rangka pengambilan kebijaksanaan kesempatan kerja.
4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam usaha perluasan kesempatan kerja yang cukup memungkinkan terserapnya angkatan kerja yang lebih banyak dalam bidang pekerjaan.

- Kegunaan Penulisan :

1. Untuk dijadikan sebagai bahan referensi baik untuk penulis maupun kepada orang lain.
2. Sebagai media latihan penulisan ilmiah dan merupakan alat penilaian diri atau kemampuan penulis sebagai calon sarjana ekonomi.

I.2 Landasan Teoritik

I.2.1 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik/Konseptual

Masalah perluasan kesempatan kerja bagi surplus tenaga kerja pada sektor tertentu, kini mendapat perhatian khusus yang sungguh-sungguh dari pemerintah sehingga semua sektor dalam ruang lingkup ekonomi diusahakan pengembangannya secara maksimal. Salah satu sektor ekonomi yang menampung sebagian besar tenaga kerja adalah sektor pertanian dan sektor informal.

Secara sektoral, pertanian menampung tenaga kerja yang berpendidikan relatif rendah sehingga menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor tersebut rendah pula.

Usaha penyebaran tenaga kerja yang berlebihan ke sektor ekonomi lainnya jelas memerlukan setidaknya-tidaknya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tersebut.

Dengan adanya perbedaan yang menyolok antara sektor pertanian (tradisional) dengan sektor lainnya, maka salah satu alternatif yang harus dipenuhi adalah meningkatkan pendidikan serta memberikan keterampilan yang memadai sehingga diharapkan dapat diserap tenaga kerja yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah, yang berarti turut pula meningkatkan taraf hidupnya yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan masalah tingkat keterampilan di

atas, maka Sadono Sukirno (1989 : 130) mengemukakan pendapatnya secara umum bahwa, Sebahagian besar negara sedang berkembang, pada mulanya kan diperhadapkan pada masalah kekurangan tenaga kerja terampil dan terdidik tetapi dalam jangka panjang hal ini teratasi dengan memperluas pendidikan. Dengan demikian adalah hambatan pembangunan yang terutama adalah kekurangan modal dan kekayaan alam yang terbatas.

Demikian pula dikemukakan oleh Michael P. Todaro (1987 : 30). Salah satu manifestasi utama dari pada rendahnya taraf hidup di negara berkembang adalah kekurangan penggunaan tenaga kerja atau karena penggunaan tidak efisien dibandingkan di negara maju.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau kita akan memperbaiki kehidupan di daerah atau di satu negara hal yang perlu diperhatikan adalah masalah tenaga kerjanya baik dengan memperluas kesempatan kerja maupun dengan memberikan latihan-latihan, sehingga bisa meningkatkan produktifitasnya.

Dari beberapa pendapat ahli ketenaga kerjaan dapat terlihat, ada yang optimis maupun sebaliknya. Tetapi terlepas dari pendapat itu menurut Chris Manning (1986 : 8) kesempatan kerja bukanlah merupakan sasaran kebijakan, tetapi tantangannya menyediakan kesempatan kerja yang lebih produktif dan berpendapatan yang lebih tinggi.

I.2.2 Hypotesis

Atas dasar pemikiran yang terkandung dalam pokok masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka hypotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Diduga, bahwa bila terjadi peningkatan produksi sektoral akan mengakibatkan meningkatnya tingkat kegiatan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.
- Diduga, bahwa laju tingkat penyerapan angkatan kerja masih lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu peningkatan penyerapan tenaga kerja.

I.3 Tata Urut Isi Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan atau penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

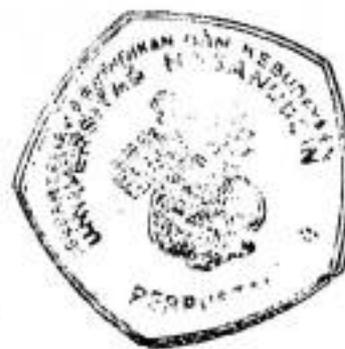
Bab Pertama, adalah bab pendahuluan, dimana diuraikan tentang latar belakang : pertimbangan obyektif dan subyektif, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta hypotesis ; landasan teoritik, dan tata urut isi pembahasan.

Bab kedua, merupakan metodologi yang berisikan mengenai lokasi penelitian, sumber data, model analisis, pembatasan unit observasi dan analysis.

Bab ketiga, adalah keadaan umum daerah penelitian memuat : Profil IBT menurut Propinsi, Tinjauan Demografi,

Jumlah Perkembangan Tenaga Kerja, Jumlah dan Perkembangan Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Bab keempat, adalah bab pembahasan memuat Elastisitas kesempatan kerja IBT terdiri dari : Kesempatan Kerja dan Penggunaan tenaga kerja, Pertumbuhan PDRB IBT, dan Elastisitas Kesempatan Kerja IBT. Selanjutnya bab ini menjelaskan produktivitas tenaga kerja IBT, dan terakhir mengenai penetapan target pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan pengangguran dan menaikkan tingkat pendapatan.



BAB II

M E T O D O L O G I

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih wilayah Indonesia Bagian Timur terdiri dari sembilan Propinsi yaitu ; (1) Sulawesi Utara; (2) Sulawesi Tengah; (3) Sulawesi Tenggara; (4) Sulawesi Selatan; (5) Maluku; (6) Nusa Tenggara Barat; (7) Nusa Tenggara Timur; (8) Timur-Timur; (9) Irian Jaya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa perhatian pemerintah akhir-akhir ini pada IBT untuk mengejar ketinggalan dari Indonesia Bagian Barat.

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Data Kuantitatif, bersumber dari data Sensus Penduduk 1980, Sensus Penduduk 1990, Supas 1985, Sakernas 1985 dan Susenas 1980-1990.

Data Kualitatif, Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah penggunaan angkatan kerja untuk memperoleh informasi data teoritis.

2.3 Model Analisis

Untuk mengukur produktivitas kerja dapat dilihat persamaan sebagai berikut (lihat Soeroto, 1986)

$$Q = \frac{Y}{N} \dots\dots\dots 1$$

Q = Pendapatan rata-rata yang bekerja tiap tahun atau produktivitas kerja.

Y = Pendapatan masyarakat atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

N = Jumlah penggunaan tenaga kerja.

Sedangkan untuk mengukur laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan produktivitas kerja dapat dipergunakan rumus geometri secara berturut-turut sebagai berikut :

$$N_t = N_0 (1 + n)^t$$

$$Y_t = Y_0 (1 + g)^t$$

$$Q_t = Q_0 (1 + q)^t$$

dimana,

N_t = Penggunaan tenaga kerja pada tahun t

N_0 = Penggunaan tenaga kerja pada tahun awal

n = Laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja

Y_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

Y_0 = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun awal

g = Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Q_t = Produktivitas kerja pada tahun t

Q_0 = Produktivitas kerja pada tahun awal

q = Laju pertumbuhan produktivitas kerja

t = Jumlah tahun yang dihitung.

Untuk mengetahui bagaimana cara pengangguran dapat ditekan dan dapat terjadi penyerapan tenaga kerja atau angkatan kerja dapat dipergunakan rumus sebagai berikut :

$$g = n + q + nq \dots\dots\dots 2$$

Definisi di atas membuktikan bahwa jika q tetap, maka semakin besar n akan makin besar pula g , demikian pula sebaliknya. Hal ini memberikan petunjuk bahwa untuk memperbesar laju peningkatan PDRB (g), salah satu alternatif adalah dengan memperbesar laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja (n) dengan syarat produktivitas tenaga kerja (q) itu tetap.

Sedangkan untuk mengukur elastisitas penggunaan tenaga kerja dapat dipergunakan perumusan sebagai berikut (lihat Payaman, 1985: 83)

$$E = \frac{n}{q} \dots\dots\dots 3$$

dimana,

E = Elastisitas penyerapan tenaga kerja

n = Laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja

q = Laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto.

Konsep elastisitas dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja tertentu baik untuk masing-masing sektor maupun untuk ekonomi secara keseluruhan.

2.4 Pembatasan Unit Observasi dan Analisis

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini, dapat dikemukakan beberapa pengertian yang diharapkan dapat lebih mempermudah untuk memahami tulisan ini. Konsep-konsep itu akan diuraikan sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja

Secara praktis, biasanya pengertian tentang tenaga kerja cukup dilihat dari segi batas umur, sehingga penduduk secara keseluruhan dapat dipisahkan antara "golongan tenaga kerja" dan golongan bukan tenaga kerja.

Dalam berbagai literatur biasanya golongan tenaga kerja adalah mereka yang masuk dalam kelompok umur 15 - 64 tahun. Akan tetapi di Indonesia yang biasa digunakan dalam sensus (1971, 1980, 1990) batasan golongan umur adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jadi menurut batasan umur tersebut maka seluruh penduduk (total population), akan terbagi atas dua golongan yakni golongan usia kerja (working age popula-

tion / man power) dan golongan di luar usia kerja (non working age population).

Meskipun ini bukan definisi dari tenaga kerja (man power), tetapi menurut Kusumosuwindho (1981 : 193), ialah sebagai berikut : Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Definisi ini telah memberikan gambaran bahwa tenaga kerja adalah sumber daya atau man power.

Jadi pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedang pertumbuhan penduduk akan meningkatkan luasnya pasar domestik. (Todaro, 1987 : 114).

b. Angkatan Kerja

Pengertian angkatan kerja secara umum memiliki perbedaan prinsipil dengan tenaga kerja, walaupun sering dipergunakan sebagian orang dengan arti yang membingungkan. Misalnya sering penulis menemukan pengertian angkatan kerja yang diartikan tenaga kerja, begitupula sebaliknya. Untuk itu telah diungkapkan penger-

tian tenaga kerja dengan relevansinya dengan judul bahasan, penulis merasa perlu memasukkan pengertian angkatan kerja pada sub-sub ini. Batasan yang dibuat dalam rangka pengertian variabel angkatan kerja, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Payaman (1985 : 3) adalah jumlah orang yang bekerja dan pencari kerja atau penganggur.

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat upah yang berlaku.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Soeroto (1983 : 12) yang nampaknya lebih lengkap sebagai berikut : Sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi secara aktif atau passip mencari suatu pekerjaan. Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diperjelas lagi terutama pada kata 'mampu' dan 'bersedia'. Kata 'mampu' disini menunjukkan pada tiga hal. Pertama adalah mampu fisik yaitu sudah cukup umur, jasmani, sudah cukup kuat. Kedua adalah mampu mental yaitu mempunyai mental sehat. Ketiga adalah secara yuridis yaitu cukup mampu

dan tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan. Sedangkan kata 'bersedia' berarti orang yang bersangkutan dapat secara aktif maupun pasif mencari pekerjaan. Jadi disini tidak ada unsur paksaan atau ada kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan batasan yang telah diajukan tersebut dapatlah dikatakan, bahwa angkatan kerja adalah bagian dari pada tenaga kerja. Oleh karena pada tenaga kerja tidak ditentukan syarat 'usia' dan hanya 'kemampuan' (kecuali oleh BPS) sehingga meskipun anak-anak yang penting adalah sudah memiliki kemampuan guna menghasilkan suatu pekerjaan lalu dapat digolongkan tenaga kerja. Akan tetapi dengan ketentuan batas usia yang telah diajukan oleh BPS itu, maka usia di bawah 10 tahun belum bisa dianggap sebagai tenaga kerja, dan karena ketentuan BPS adalah tak lain merupakan ketentuan pemerintah. Jadi angkatan kerja adalah seluruh penduduk yang mempunyai usia kerja yang bekerja atau aktif maupun pasif mencari pekerjaan disertai memiliki kemampuan seperti yang telah dikemukakan oleh Soeroto di depan.

Angkatan kerja merupakan konsep yang memperlihatkan economically active population, sedangkan bukan

angkatan kerja adalah mereka yang tergolong non-economically active population. Konsep man power juga menunjuk pada labour force. Ini berbeda dengan penduduk yang berusia kerja, karena tak semua penduduk usia kerja tergolong dalam angkatan kerja, akan tetapi hanyalah mereka yang dinyatakan tergolong dalam usia kerja yang diperhatikan apakah tergolong angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. penetapan usia kerja sendiri tak lepas dari masalah-masalah. Umpamanya pada suatu masyarakat banyak anak yang tidak tergolong usia kerja tetapi pada kenyataannya bekerja, sementara mungkin banyak juga tergolong usia pensiun masih bekerja. Bagi penetapan usia kerja, yang memerlukan perhatian adalah penetapan batas umur bawah dan atas seperti halnya telah dikemukakan pada uraian tentang konsep angka ratio beban tanggungan sedikit banyak, batas-batas usia kerja dari penduduk suatu masyarakat merupakan fungsi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Papayungan (1988 : 5) dalam bukunya Ekonomi Sumber Daya Manusia mengajukan bahwa tidak semua orang yang berusia 10 tahun ke atas tergolong ke dalam angkatan kerja. Hanya penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan yang digolongkan angkatan kerja.

Dari beberapa penjelasan di atas, hingga ternyata-

ta, angkatan kerja itu tak lain dari pada tenaga kerja itu sendiri akan tetapi sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan disertai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Mereka yang tergolong usia kerja akan tetapi tidak bekerja, serta tidak berkeinginan untuk bekerja adalah bukan angkatan kerja, meskipun mereka termasuk usia kerja. Contoh untuk pernyataan terakhir ini maupun beberapa kutipan yang telah ada sebelumnya menunjukkan, bahwa tenaga kerja yang tidak tergolong angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, orang cacat, orang sakit parah, dan lain-lain. Sedang yang berhubungan dengan pernyataan tentang batas-batas usia kerja fungsi kebudayaan adalah karena adanya ketidak pastian batas usia kerja yang diajukan oleh beberapa penulis sehubungan dengan kenyataan yang biasa ditemui sehari-hari di negara kita yaitu anak di bawah umur kerja yang bekerja, misalnya kebiasaan anak petani yang bekerja dan sebagainya. Bila dikutip dari beberapa formula Ratio Beban tanggungan kemudian kalau angkatan adalah mereka yang sudah bekerja atas dasar ketentuan umur 15 - 64 tahun sesuai formulasi rumus yang nantinya akan ditemukan. Ini berarti, bahwa angkatan kerja adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok usia kerja dimaksud sudah bekerja.

Dengan demikian sebagaimana pada ungkapan-ungkapan sebelumnya dibandingkan kutipan ini, nampak terdapat kesamaan atau hampir sama. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa untuk Indonesia angkatan kerja dalam pengertiannya adalah penduduk usia kerja yang berusia 10 tahun ke atas akan tetapi sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan secara aktif maupun pasif, sekaligus memiliki syarat-syarat mampu dan punya kehendak untuk bekerja. Untuk anak-anak di bawah usia kerja dimaksud, meskipun mereka telah mampu dan sudah bekerja, akan tetapi tidak boleh dimasukkan sebagai angkatan kerja maupun tenaga kerja, sebab selain usia mereka belum cukup, merekapun belum memiliki syarat mampu karena masih diawasi serta tidak bebas dalam bertindak karena ada orang tua mereka. Jadi, dari segi hukum mereka lemah (tidak layak) dan dianggap saja keikutsertaan anak-anak tersebut dalam bekerja sebagai kebudayaan atau kebiasaan saja (yang berlaku). Atas dasar beberapa pengertian yang telah dibuat ini diharapkan untuk kekeliruan dan salah penafsiran sudah bisa dihindari.

c. Kesempatan Kerja

Pengertian kesempatan kerja lazimnya dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja pada suatu waktu tertentu ataupun pada tempat tertentu. Namun

kesempatan kerja bukanlah lapangan kerja, walaupun pada dasarnya untuk mencapai sasaran tersebut dimasa akan datang adalah untuk meluaskan kesempatan kerja bagi sebagian penduduk. Lebih jauh dapat dilihat pengertian kesempatan kerja yang dikemukakan oleh Sudarsono (1983: 324) antara lain : Kesempatan kerja menggambarkan besarnya rumah tangga perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi.

Pendapat yang dikemukakan tersebut di atas pada dasarnya mencakup ruang lingkup suatu perusahaan atau secara mikro. Pengertian kesempatan kerja lainnya dikemukakan oleh Soediyono (1981 : 527) sebagai berikut: Perekonomian dimana semua kapasitasnya ada dalam penggunaan penuh, dikatakan bahwa perekonomian tersebut ada dalam full employment. Sedangkan perekonomian dimana ada sebagian kapasitas produksinya tidak terpakai disebut keadaan under employment.

Pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa besar kecilnya tingkat kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh produksi suatu negara. Hal ini dapat terjadi apabila peningkatan produksi nasional lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk daerah tersebut. namun bukan berarti dapat memberikan jaminan bagi terciptanya kesempatan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaga agar ting-

kat kesempatan kerja berada pada posisi yang diinginkan, maka penyediaan lapangan kerja perlu diarahkan pada terciptanya lapangan kerja yang bersifat padat karya sambil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil agar pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat teratasi walaupun tidak secara keseluruhan. Rudolf H. Strahm (1983 : 109) dalam bukunya yang berlimpah dan merana mengemukakan sebagai berikut : Teknologi tepat guna merupakan bentuk yang paling tepat bagi negara-negara berkembang, bukan produksi tradisional maupun teknologi modern yang padat modal. Teknologi tepat guna lebih produktif dari pada teknologi tradisional, tetapi lebih sedikit memerlukan modal apabila dibandingkan dengan teknologi yang modern.

Formulasi yang dikemukakan di atas memberikan gambaran, bahwa kebijaksanaan umum diarahkan pada penciptaan iklim sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat terwujud. Kebijakan di sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan produksi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

d. Pasar Tenaga Kerja

Seseorang dalam pasar tenaga kerja berarti menawarkan jasanya untuk produksi, apakah dia seorang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Besarnya

penempatan jumlah orang yang bekerja dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya : mutu tenaga kerja, upah, produk domestik daerah tersebut.

Permintaan akan tenaga kerja datang dari para pengusaha atau produsen dan beberapa instansi yang menghendaki tenaga kerja itu berhubungan dengan jasa-jasa yang diberikan pada usaha produksi. Upah yang dibayarkan oleh pengusaha merupakan suatu bagian dari biaya produksi. Oleh karena pengusaha dalam tafsirannya yang subyektif dari jumlah uang yang dibayarkan sebagai upah, dengan mengingat akan harga yang diterima sebagai hasil akhir produksinya. Hasil produksi itu timbul sebagai akibat dari kerja sama antara faktor produksi kapital dan tenaga kerja, dimana faktor-faktor ini masing-masing memberikan sumbangan produksinya. Jadi pada dasarnya untuk menetapkan upah itu adalah produktivitas kerjanya.

Pasar tenaga kerja adalah merupakan mekanisme mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Proses ini memerlukan waktu yang lama karena tenaga kerja dengan lowongan kerja tidak homogen. Pengertian pasar tenaga kerja lebih jauh dikemukakan sebagai berikut :
Pasar tenaga kerja adalah, seluruh aktivitas dari

pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. (Simanjuntak, 1985 : 86)

Selanjutnya dikatakan, bahwa pelaku-pelaku tersebut terdiri dari : pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, pencari kerja dan perantara yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk bertemu. Usaha untuk mempertemukan dalam hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun badan usaha swasta lainnya.

Pengertian yang dijelaskan di atas memberikan pengertian bahwa perlunya perantara untuk mempertemukan pengusaha dan pencari kerja disebabkan karena pencari kerja tidak mempunyai pendidikan dan keterampilan yang sama sementara pada pihak lain sebagai pengusaha memerlukan yang mampu mengisi lowongan kerja yang tersedia sesuai dengan pendidikan dan keterampilan masing-masing pencari kerja. Oleh karena itu tidak semua pencari kerja yang datang mampu mengisi lowongan tertentu.

Menyikung masalah tingkat pendidikan dan keterampilan setiap pencari kerja, maka dalam setiap usaha mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, lebih lanjut dapat ditemui dua bentuk pasar masing-masing dari segi kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

- a. Dari segi kuantitatif, penawaran tenaga kerja adalah sejumlah orang yang ingin bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedang-



kan permintaan tenaga kerja adalah sejumlah lapangan kerja yang ditawarkan oleh kegiatan ekonomi pada waktu tertentu.

- b. Dari segi kualitatif, ketidakcocokan angkatan kerja yang ditawarkan dengan permintaan tenaga kerja.

Dari kedua bentuk pasar tenaga kerja di atas yang perlu dilihat adalah pasar tenaga kerja yang dilihat dari segi kualitatif, yaitu adanya perbedaan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Perbedaan tersebut sering kali dijumpai, disebabkan oleh karena umur, tingkat pendidikan dan keterampilan pencari kerja, dan lain-lain. Perbedaan tersebut menyebabkan sulitnya untuk bertemu dengan lowongan kerja yang ada.

Proses mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja ternyata memerlukan waktu lama. Proses ini, baik pencari kerja maupun pengusaha diperhadapkan pada kenyataan bahwa :

1. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan dan sikap pribadi yang berbeda. Di lain pihak setiap lowongan yang tersedia mempunyai sifat pekerjaan yang berlainan. Oleh karena itu, untuk mengisi lowongan yang berlainan, pengusaha memerlukan pekerjaan dengan pendidikan, keterampilan,

kemampuan, bahkan mungkin dengan sikap pribadi yang berbeda. Tidak semua pelamar kerja akan cocok untuk suatu lowongan kerja. Dengan demikian, tidak semua pelamar mampu dan dapat diterima untuk suatu lowongan tertentu.

2. Setiap perusahaan atau unit usaha menghadapi lingkungan yang berbeda; keluasan; masukan, manajemen, teknologi, lokasi, pasar dan lain-lain, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, jaminan, dan lingkungan perkejaan. Oleh sebab itu, tidak semua pencari kerja bersedia menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang berlaku di suatu perusahaan. Sebaliknya, tidak semua pengusaha mampu dan bersedia mempekerjakan seorang pelamar dengan tingkat upah dan harapan-harapan yang dikemukakan oleh pelamar tersebut.

BAB III

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

3.1 Profil Wilayah IBT Menurut Propinsi

Uraian berikut ini mengenai profil wilayah IBT menurut Propinsi yang meliputi aspek geografi, demografi dan potensi ekonomi, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang agak luas, dikaitkan dengan pembahasan pada tulisan ini.

Indonesia Bagian Timur terletak pada 5^o lintang Utara dan 10^o lintang Selatan, 116^o - 141^o Bujur Timur dengan luas areal/wilayah 772.654 kilometer persegi atau sebesar 40 persen dari total luas Indonesia.

Jumlah penduduk yang mendiami wilayah IBT adalah 23.413 ribu jiwa (1990) dengan distribusi yang terbesar di Pulau Sulawesi yaitu 12.521 ribu jiwa atau 53,49 persen, kemudian disusul Nusa Tenggara 6.639 ribu jiwa atau 28,36 persen dan Maluku & Irian Jaya 3.505 jiwa atau 14,97 persen.

Rata-rata kepadatan penduduk wilayah IBT adalah 33,30 orang/kilometer persegi. Angka ini hanya kurang dari sepertiga dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk Indonesia.

Potensi ekonomi IBT yang dapat ditonjolkan misalnya

Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan (beras) di Indonesia, diharapkan dapat melayani kebutuhan pangan propinsi-propinsi lainnya di IBT, bahkan untuk Kalimantan Timur dan daerah-daerah Indonesia lainnya.

Walaupun sektor Industri relatif belum berkembang, akan tetapi pusat-pusat kegiatan seperti di Ujung Pandang dan sekitarnya, Manado - Bitung, dan beberapa tempat lainnya diharapkan dapat distimulir pada masa yang akan datang.

Wilayah IBT juga memiliki potensi di sektor perikanan (laut) dan pertambangan (misalnya nikel di Soroako, Sulawesi Selatan, aspal di Buton, Sulawesi Tenggara, minyak bumi di Sorong, Irian Jaya, dan lainnya).

a. Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah sebesar 72.781 Km² atau sebesar 3,82 persen dari seluruh luas Indonesia.

Jumlah penduduk (1990) 6.982 ribu jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,42 persen per tahun (1980 - 1990). Rata-rata kepadatan penduduk 90 orang/kilometer persegi. Sulawesi Selatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada posisi silang, yang menjembatani wilayah IBT dan IBB dan menghubungkan jalur pelayaran melalui Selat Makassar.

Kegiatan ekonomi yang utama adalah sektor pertanian

(tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan). Di samping itu juga mempunyai potensi dalam pengembangan industri (antara lain : semen, kertas, pengolahan kayu, gula, besi baja, terigu, seng, sutra alam dan lainnya).

Sulawesi Selatan memiliki obyek pariwisata yang terkenal yaitu Tana Toraja, yang mendapat kunjungan banyak wisatawan asing dan domestik.

b. Sulawesi Tenggara

Wilayah Sulawesi Tenggara meliputi areal seluas 27.686 kilometer persegi atau kurang lebih 1,45 persen dibanding luas seluruh Indonesia.

Penduduk propinsi ini (tahun 1990) 1.350 ribu jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 3,66 persen/tahun (1980 - 1990). Kepadatan penduduknya adalah 49 orang perkilometer persegi.

Sektor produksi yang menonjol di propinsi ini adalah sektor pertanian, utamanya sub-sektor perkebunan dan kehutanan, di samping sub-sektor tanaman pangan yang cukup memadai. Sektor lainnya yang mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan adalah sektor pertambangan (aspal dan nikel).

c. Sulawesi Tengah

Luas Sulawesi Tengah adalah 68.033 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 1.711 ribu jiwa (1990), tingkat

pertumbuhan penduduk rata-rata 2,87 persen (1980 - 1990), dan kepadatan penduduknya adalah 25 orang per kilometer persegi.

Enam puluh persen dari wilayah Sulawesi Tengah adalah hutan yang memiliki jenis kayu yang mempunyai nilai ekspor yang tinggi. Sub sektor perkebunan/tanaman juga cukup berpotensi (cengkeh dan lainnya). Daerah ini mengandung pula berbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, timah, nikel bahan galian bukan logam seperti minyak bumi, asbes, gips, dan batu bara.

d. Sulawesi Utara

Luas provinsi Sulawesi Utara adalah 25.786 kilometer persegi. Jumlah penduduknya (tahun 1990) adalah 2.478 ribu jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,60 persen (1980 - 1985), dan kepadatan penduduknya 130 orang per kilometer persegi.

Sektor ekonomi yang memegang peranan penting adalah sektor pertanian, utamanya sub sektor perkebunan/tanaman perdagangan. Sub sektor perikanan juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Potensi lainnya yang patut dicatat adalah sumber energi paras bumi yang masih belum dikembangkan serta beberapa bahan mineral seperti timah hitam dan tembaga.

e. Maluku

Propinsi Maluku terdiri atas \pm 1.000 buah pulau besar dan kecil yang terbesar pada perairan seluas 765.272 kilometer persegi, sedangkan luas daratan adalah 85.728 kilometer persegi. Jumlah penduduknya (tahun 1990) adalah 1.856 ribu jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,78 persen per tahun (1980 - 1990) dan kepadatan penduduknya adalah 25 orang per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk (\pm 13 persen) berdiam di daerah perkotaan.

Sektor produksi yang menonjol adalah sektor pertanian, utamanya sub sektor tanaman perdagangan rakyat, tanaman pangan, kehutanan, dan perikanan. Khusus sub sektor perikanan, Propinsi Maluku mempunyai potensi yang relatif sangat besar.

Dalam sektor kepariwisataan, propinsi ini memiliki potensi yang cukup besar, meskipun belum begitu berkembang karena sarana dan prasarana belum begitu mendukung. Maluku memiliki obyek wisata yang khas, yaitu taman-taman laut di samping obyek-obyek peninggalan sejarah.

f. Irian Jaya

Luas Irian Jaya seluruhnya adalah 410.660 kilometer persegi atau 21,6 persen dari luas Indonesia. 75 persen daratan tertutup hutan yang lebat dan bergunung-gunung. Jumlah penduduknya adalah 1.649 ribu jiwa (tahun 1990), dengan laju pertumbuhan 3,46 persen per tahun (1980 -

1990), dan kepadatan penduduknya 4 orang per kilometer persegi. Penyebaran penduduk tidak merata dan sebagian besar berada di daerah pedalaman.

Potensi produksi yang menonjol dan diharapkan berkembang pesat di masa mendatang adalah sektor pertambangan (minyak bumi, nikel, dan tembaga). Sub-sektor kehutanan dan perikanan mempunyai potensi untuk dikembangkan. Prasarana perhubungan darat masih sangat minim dan terbatas yaitu hanya pada daerah pesisir pantai (daerah kota). Sub-sektor perhubungan udara sangat dibutuhkan untuk menghubungkan daerah pesisir dengan daerah-daerah pedalaman yang sebagian besar masih terisolasi.

g. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki wilayah seluruh 19.855 kilometer persegi jumlah penduduk (tahun 1990) 3.370 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,15 persen pertahun (1986 - 1990), dan kepadatan penduduknya 167 orang per kilometer persegi.

Potensi produksi yang menonjol adalah sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan perikanan, peternakan, dan tanaman perdagangan.

h. Nusa Tenggara Timur (NTT)

Nusa Tenggara Timur (terdiri dari tiga pulau besar yaitu Flores, Sumba, dan Timor) mempunyai luas wilayah

49.924 kilometer persegi. Jumlah penduduknya (tahun 1990) 3.269 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,79 persen pertahun (1980 - 1990), dan kepadatannya adalah 68 orang per kilometer persegi.

Sektor produksi yang menonjol adalah pertanian, utamanya sub-sektor peternakan dan perikanan. Sektor pariwisata di NTT cukup besar potensinya yaitu keajaiban alam yang menarik (seperti Danau Kalimutu yang mempunyai tiga warna).

i. Timor-Timur

Luas provinsi termuda Timor-Timur adalah 18.699 kilometer persegi. Jumlah penduduknya (tahun 1990) adalah 748.000 dengan laju pertumbuhan penduduk 3,02 persen pertahun (1980 - 1990) dan kepadatan penduduknya adalah 40 orang perkilometer persegi.

Timor-Timur adalah daerah potensial untuk pengembangan pertanian. Sayangnya sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal.

3.2 Tinjauan Demografi

3.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Bagian Timur

Tabel 3.1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia Bagian Timur : 1980 - 1990

No.	Propinsi	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
		1980	1990	1980 - 1990
1.	Sulawesi Utara	2.115.000	2.478.000	1,60
2.	Sulawesi Tengah	1.298.000	1.711.000	2,87
3.	Sulawesi Tenggara	947.000	1.350.000	3,66
4.	Sulawesi Selatan	6.062.000	6.982.000	1,42
5.	Maluku	1.411.000	1.856.000	2,78
6.	Nusa Tenggara Barat	2.725.000	3.370.000	2,15
7.	Nusa Tenggara Timur	2.737.000	3.269.000	1,79
8.	Timor-Timur	555.000	748.000	3,02
9.	Irian Jaya	1.174.000	1.649.000	3,46
	J B T	19.211.000	23.413.000	2,10

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 1980.
Statistik Indonesia 1990.

Berdasarkan data di atas Indonesia Bagian Timur mempunyai rata-rata pertumbuhan penduduk 2,10 persen tiap tahun. Propinsi yang paling banyak penduduknya adalah Sulawesi Selatan pada tahun 1980 berjumlah sekitar 6.062.000 jiwa, pada tahun 1990 meningkat menjadi sekitar 6.982.000 jiwa, atau rata-rata pertumbuhan penduduk propinsi ini adalah 1,42 % tiap tahun. Propinsi terbesar kedua penduduknya setelah tahun 1980 adalah Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk sekitar 3.370.000 orang, laju pertumbuhan penduduk propinsi sebesar 2,15 % tiap tahun. Sedangkan daerah yang terkurang penduduknya adalah Timur-Timur. Pada tahun 1980 jumlah penduduk propinsi ini sebanyak 555.000 orang, pada tahun 1990 meningkat menjadi 748.000

orang, atau tumbuh rata-rata 3,02 % tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk IBT masih lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk secara nasional yaitu 1,89 % tiap tahun. Sebab tingginya pertumbuhan ini karena di beberapa daerah pertumbuhan penduduknya masih relatif tinggi, misalnya Sulawesi Tenggara, Timur-Timur dan Irian Jaya, yang masih di atas 3 % tiap tahun. Salah satu sebab tingginya pertumbuhan penduduk pada kawasan ini adalah berkaitan erat dengan program pemerintah yaitu transmigrasi.

Tingkat kepadatan penduduk IBT pada tahun 1980 sebanyak 24,6 orang per kilometer persegi, pada tahun 1990 meningkat menjadi 30,3 orang per kilometer persegi.

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang mengalami peningkatan, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk keperluannya. Agung (1992 : 27) mengatakan bahwa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk maka timbul beberapa peningkatan, antara lain; peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kebutuhan, peningkatan persaingan peningkatan sampah dan peningkatan beban terhadap lingkungan.

Komposisi penduduk IBT (SP 1990) menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin wanita sebanyak 12.229.987 orang sedangkan laki-laki hanya 11.307.233 orang.

Struktur umur penduduk lebih dominan pada penduduk usia mudah. Jumlah penduduk Balita sebanyak 3.095.034 orang, disusul usia anak-anak (kelompok umur 5 - 9) sebanyak 3.189.24 orang.

Tabel 3.2. Komposisi penduduk Indonesia Bagian Timur menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 1990

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		1980	1990	
1.	0 - 4	1.847.801	1.247.233	3.095.034
2.	5 - 9	1.623.522	1.565.732	3.189.254
3.	10 - 14	1.511.622	1.439.236	2.950.858
4.	15 - 19	1.251.563	1.296.326	2.547.889
5.	20 - 24	893.733	1.027.652	1.921.383
6.	25 - 29	801.753	1.007.041	1.808.794
7.	30 - 34	770.412	852.343	1.622.755
8.	35 - 39	733.404	766.403	1.499.307
9.	40 - 49	553.402	620.916	1.174.318
10.	50 - 54	427.389	411.807	839.196
11.	55 - 59	282.868	291.824	574.692
12.	60 - 64	250.855	254.711	505.566
13.	65 +	358.909	361.213	720.122
	I B T	11.307.233	12.229.987	23.537.220

Sumber : BPS, Penduduk Indonesia 1990.

3.2.2 Jumlah dan Perkembangan Tenaga Kerja

Sejalan dengan adanya perkembangan penduduk di Indonesia Bagian Timur, maka juga mempengaruhi keadaan tenaga kerja dalam artian, bahwa jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan.

Pada tabel 3.3 di bawah ini akan memperlihatkan jumlah dan laju pertumbuhan tenaga kerja di IBT dari tahun 1980 - 1990.

Tabel 3.3. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja
Per Tahun Indonesia Bagian Timur 1980 - 1990

No.	Propinsi	1980	1990	Laju Pertumbuhan
				1980 - 1990
1.	Sulawesi Utara	1.581.768	1.951.715	2,66
2.	Sulawesi Tengah	871.898	1.295.041	4,83
3.	Sulawesi Tenggara	619.685	907.706	3,89
4.	Sulawesi Selatan	4.198.366	5.318.678	2,39
5.	Maluku	961.519	1.298.377	2,98
6.	Nusa Tenggara Barat	1.818.971	2.387.284	2,76
7.	Nusa Tenggara Timur	1.932.475	2.462.776	2,45
8.	Irian Jaya	755.459	1.449.842	4,81
	I B T	12.660.133	16.732.671	2,83

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1980
(Data diolah).

Melihat data yang tersebut pada tabel di atas, menjadi petunjuk bahwa jumlah tenaga kerja setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu, IBT sebesar 2,83 persen pertahun.

Propinsi yang sangat menonjol laju pertumbuhannya yaitu Sulawesi Tengah pada tahun 1980 hanya berjumlah 871.898 jiwa menjadi 1.295.041 jiwa pada tahun 1990 atau mengalami pertumbuhan sekitar 4,83 persen pertahun. Propinsi yang menyusul Sulawesi Tengah adalah Irian Jaya, laju pertumbuhannya adalah 4,81 persen pertahun. Penulis menduga bahwa laju pertumbuhan yang besar ini disebabkan pada kedua propinsi ini, jumlah migrasi yang masuk cukup besar, yang terutama berasal dari propinsi-propinsi lain.

3.2.3 Jumlah dan Perkembangan Angkatan Kerja

Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa angkatan kerja adalah bahagian dari tenaga kerja yang secara aktif maupun passif terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam proses pekerjaan. Ini berarti kenaikan jumlah tenaga kerja relatif akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja.

Pada tabel 3.4 kita akan melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan angkatan kerja dalam satu dasawarsa (1980 - 1990).

Tabel 3.4. Jumlah dan laju pertumbuhan angkatan kerja Indonesia Bagian Tiur : 1980 - 1990

No.	Propinsi	1980	1990	Laju Pertumbuhan
				1980 - 1990
1.	Sulawesi Utara	674.979	1.072.834	4,73
2.	Sulawesi Tengah	420.268	750.482	5,77
3.	Sulawesi Tenggara	275.557	547.166	7,10
4.	Sulawesi Selatan	1.643.506	2.618.886	4,77
5.	Maluku	483.844	636.198	4,65
6.	Nusa Tenggara Barat	903.874	1.447.364	4,82
7.	Nusa Tenggara-Tiur	1.020.062	1.658.112	4,98
8.	Irian Jaya	364.143	700.955	6,76
	I B T	5.715.313	9.431.197	5,14

Suaber : BPS, Penduduk Indonesia 1980
Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1990.

Tingginya tingkat kelahiran di tahun 70-an cukup mempengaruhi angkatan kerja pada periode 1980 - 1990 ini dapat kita lihat pada tabel di atas yaitu berkisar 4,73

persen per tahun sampai pada 7,10 persen per tahun. Jumlah ini cukup besar terutama bila dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Sehingga tidak mengherankan bila jumlah pengangguran cukup besar (ini akan diperlihatkan kemudian).

3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) suatu kelompok penduduk tertentu adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama.

Secara singkat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$$

Semakin besar jumlah angkatan kerja maka semakin besar TPAK pada kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin banyak yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, dan akibatnya semakin kecil TPAK.

Dengan demikian dengan mudah dapat dipahami bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah. Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkat penyediaan fasilitas dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga. Dengan kata lain, penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi keluarga secara tidak langsung mempengaruhi TPAK.
2. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja dipengaruhi oleh penduduk yang mengurus rumah. Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.
3. Bagaimana suatu keluarga mengatur siapa yang bekerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga pada dasarnya tergantung dari tingkat penghasilan dan jumlah tanggungan dari keluarga yang bersangkutan. Keluarga berpenghasilan besar relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga bekerja, jadi TPAK relatif tinggi.

4. TPAK juga dipengaruhi oleh umur. Penduduk berumur muda umumnya mempunyai tanggung jawab yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka bersekolah.

Penduduk dalam kelompok umur 25 - 55 tahun terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah dan oleh sebab itu TPAK relatif besar. Sedang penduduk di atas 55 tahun sudah mulai menurun kemampuannya untuk bekerja, dan tingkat partisipasinya (TPAK) relatif rendah.

5. TPAK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita dengan semakin tingginya pendidikan kecenderungan untuk bekerja semakin besar ini proposional dengan TPAK-nya.

6. TPAK dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat. Semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat.

7. TPAK juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang. Di lain pihak menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk

dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut. Orang yang mempunyai kemampuan kerja berusaha untuk mengisi kesempatan kerja yang ada.

Berikut ini akan diperlihatkan besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja IBT pada tahun 1980 dan tahun 1990.

Tabel 3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja IBT Menurut Propinsi 1980 dan 1990

No.	Propinsi	Tingkat Partisipasi AK	
		1980	1990
1.	Sulawesi Utara	44,94	54,93
2.	Sulawesi Tengah	49,23	57,95
3.	Sulawesi Tenggara	44,48	60,28
4.	Sulawesi Selatan	39,15	49,24
5.	Maluku	42,00	49,36
6.	Nusa Tenggara Barat	49,69	60,63
7.	Nusa Tenggara Timur	52,78	67,33
8.	Irian Jaya	48,20	62,63
	I B T	46,31	57,58

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 1980.
Statistik Indonesia 1990.

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di IBT rata-rata meningkat persentasenya. Hal ini mencerminkan proporsi angkatan kerja dari tenaga kerja semakin meningkat.

Dalam masalah partisipasi angkatan kerja, yang kita sering jumpai sehari-hari adalah bahwa keputusan mengenai

apakah seseorang harus bekerja dan berapa lama dalam seminggu ia perlu bekerja, tidak semata-mata ditetapkan oleh pribadi seseorang. Tetapi ditetapkan secara bersama oleh anggota keluarga. Misalnya keputusan mengenai siapa orang yang harus bekerja, berapa lama ia harus bekerja, apakah istri harus ikut bekerja itu biasanya diputuskan oleh beberapa anggota keluarga.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK di desa relatif lebih besar di banding di kota, ini disebabkan karena tingkat penghasilan di desa relatif lebih rendah dibandingkan dengan di kota, sehingga pada umur 10 tahun ke atas mereka segera memasuki lapangan kerja untuk menunjang kehidupan keluarga.

3.3 Tingkat Pendidikan

Kebanyakan pakar ekonomi mungkin setuju bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa, bukan modal fisik ataupun sumber daya material, yang akhirnya menentukan karakter dan kecepatan dari pembangunan rasional dari segi sosial dan ekonominya. Prof. Habison dalam (Todaro, 1987 : 336) mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat passif, manusia adalah agen-agen yang secara aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasikan sumber - sumber alam, membangun organisasi - organisasi

sosial dan beberapa pembangunan nasionalnya. Dapat dikatakan bahwa suatu negara atau daerah yang tidak bisa mengembangkan keahlian dan pengetahuan secara efektif maka hampir dipastikan bahwa negara tersebut tidak bisa berkembang.

Mengembangkan kelembagaan yang pokok dalam mengembangkan keahlian dan kemampuan atau pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal. Banyak negara dunia ketiga telah digiring untuk atau telah mau mempercayai bahwa perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif merupakan kunci utama menuju pembangunan nasional; semakin bertambah pendidikan, semakin cepat pembangunan. Dengan demikian negara tersebut telah mengikatkan diri mereka kepada sasaran yang universal yaitu perluasan pendidikan dasar dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tindakan ini telah menjadi sangat sensitif secara politis walaupun secara ekonomis sangat mahal. Baru belakangan ini sejumlah politikus, negarawan, pakar ekonomi atau perencana pendidikan di dalam maupun di luar negara-negara dunia ketiga 'mitos' pendidikan 'formal' tersebut.

Meskipun demikian, tantangan tersebut mulai mendapat momentum yang berasal dari berbagai sumber. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada karakter dan hasil-hasil dari proses pembangunan itu sendiri. Secara garis besar-

nya, memang dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penanaman pendidikan memang sangat penting bagi umat manusia. E.F.Schumacher 'Kecil itu Indah' bahkan lebih mempertajam pentingnya pendidikan, dimana beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci dan segala-galanya, lewat pendidikan timbul berbagai penemuan di berbagai bidang yang membawa kemajuan.

Dari penyajian Schumacher di atas, dapat dikatakan bahwa dari semua sumber daya, pendidikanlah yang terpenting. Kalau peradaban sekarang ini sedang dalam krisis, bukan mustahil jika kita katakan bahwa boleh jadi ada sesuatu yang salah dalam sistem pendidikannya.

Schumacher yakin bahwa tak ada peradaban yang lebih banyak mengeluarkan tenaga dan sumber daya untuk pendidikan daripada peradaban barat dan jika kita sudah tidak punyai kepercayaan apapun lagi, kita masih tak percaya bahwa pendidikan adalah, atau seharusnya menjadi kunci segala-galanya. Kepercayaan itu bahkan demikian besarnya sehingga kita menganggap pendidikan adalah pewaris sisa-sisa semua masalah kita. Jika saman nuklir menimbulkan bahaya baru, jika Cloro Floro Carbon (CFC) dapat merusak Ozon, maka jawaban kita adalah pendidikan harus lebih banyak dan lebih baik lagi. Cara hidup modern semakin

rumit, dan ini berarti bahwa setiap orang harus semakin terpelajar.

Sejurus kemudian, maka pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa yang pada pokoknya adalah usaha untuk meningkatkan kehidupan bangsa atau taraf hidup rakyat dalam arti yang luas. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan suatu masyarakat dan mencerminkan tingkat hidup masyarakat tersebut. Oleh karena itu agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka hal ini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Adapun jenjang pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia adalah mulai dari sekolah taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah lanjutan serta tingkat pendidikan tinggi.

Kita juga harus menyadari bahwa banyaaak pernyataan-pernyataan terdahulu, itu dibuat berdasarkan perluasan kesempatan bersekolah yang secara kuantitatif tidak terarah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup terutama untuk golongan miskin, memburkan berbagai suku atau etnis yang ada mendorong terciptanya tingkah laku modern yang justru memperlihatkan betapa hal tersebut terlalu dilebih-lebihkan, dan dalam beberapa hal hanyalah tipuan belaka.

Sebagai akibatnya, kesadaran bahwa perluasan pendidikan formal tidak selalu harus identik dengan perluasan belajar, telah mulai menyebar di banyak negara berkembang bahwa mendapatkan ijazah dan gelar yang lebih tinggi tidaklah selalu berarti meningkatnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang produktif bahwa pendidikan berorientasi pada pekerjaan di sektor urban yang modern akan dapat mengacaukan aspirasi anak didik, dan bahwa investasi yang berlebihan dalam pendidikan formal, dapat mengalihkan alokasi sumber-sumber yang langka dari aktivitas yang secara sosial produktif (misalnya, penciptaan kesempatan kerja secara langsung) dan karena justru menjadi beban pembangunan apabila orang yang telah memperoleh pendidikan formal lantas tidak produktif.

Sistem pendidikan di negara-negara dunia ke tiga sangat kuat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keseluruhan suasana, besarnya, dan karakter proses pembangunan bangsa tersebut.

Ilmu ekonomi pendidikan adalah penting walaupun belum mempunyai bentuk/wujud sebagai suatu unsur ilmu ekonomi pembangunan. Ia termasuk ilmu baru, yang baru pada awal tahun 1980-an muncul sebagai cabang ilmu ekonomi yang mandiri. Meskipun demikian, apabila kita menyadari bahwa motivasi utama atau permintaan terhadap pendidikan di negara-negara berkembang adalah sebagai upaya perbaikan

ekonomi yang dicita-citakan melalui kesempatan yang lebih baik, maka kita perlu memahami proses ekonomi dimana aspirasi-aspirasi semacam itu dapat dicapai atau tidak.

Pada dasarnya pendidikan formal tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus ada daya dukung yang kuat, yang dapat menyerap para lulusan suatu perguruan; begitu pula sebaliknya pendidikan formal harus menciptakan para lulusan yang berkualitas baik, atau yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Apabila hal ini tidak dapat tercapai maka muncul masalah umum yang disebut inefisiensi dan kelambanan sistem pendidikan. Masalah ini muncul karena adanya teknik belajar yang tidak mampu menciptakan intelektual yang berkualitas. Ini justru merupakan tantangan bagi orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan untuk berusaha menciptakan sistem pendidikan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Bila dilihat sebagai sebuah perusahaan dagang yang besar, sekolah-sekolah dan akademi saat ini, memberikan gambaran yang suram. Kita menemukan teknologi zaman purba dalam pendidikan yang tidak akan dapat bertahan dalam sektor ekonomi manapun. Metode pengajaran dan teknik-teknik belajar sudah karatan, rapuh, dan sudah menjadi barang kuno.

Namun perlu disadari bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan akan mempengaruhi rendahnya tingkat produktivitas kerja. Namun bukan berarti bahwa

banyak orang yang berpendidikan tinggi akan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Ini disebabkan karena belum tentu orang yang telah mendapat pendidikan yang lebih tinggi telah dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Lalu bagaimanakah hubungan atau keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan tingkat perekonomian yang sebenarnya. Pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian suatu negara atau suatu daerah, bahkan keduanya tidak boleh saling melepaskan diri.

Pendidikan pada satu pihak membutuhkan perekonomian yang lebih baik, dilain pihak perekonomian menumbuhkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik.

Indonesia Bagian Timur dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan pendidikan, hal ini capat kita lihat dalam peningkatan selama 10 tahun pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk IBT
Berumur 10 tahun ke atas Yang Pernah Sekolah
dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditaamatkan

No.	Propinsi	Tidak/ Belum Tanat SD	Pendidikan Tertinggi Yang Ditaamatkan				Jumlah	
			S D	SLP Unua/Kej.	SLA Unua/Kej.	Akademi/Diploma		Universitas
1.	Sulawesi Utara	789.795	388.623	136.958	95.128	4.236	4.556	1.411.296
2.	Sulawesi Tengah	398.342	147.655	55.125	36.494	2.186	2.090	641.892
3.	Sulawesi Tenggara	238.552	128.702	37.404	26.128	1.147	479	424.484
4.	Sulawesi Selatan	1.471.954	748.473	240.273	187.204	13.655	8.322	2.561.881
5.	Maluku	415.867	259.266	77.405	52.501	2.756	2.897	810.688
6.	Nusa Tenggara Barat	621.649	267.051	73.444	56.642	2.889	1.970	1.023.565
7.	Nusa Tenggara Timur	787.339	485.105	84.614	58.095	3.137	3.397	1.341.661
8.	Irian Jaya	299.641	117.749	39.792	27.875	1.964	1.325	395.546
IBT (1968)		4.923.339	2.446.624	745.915	548.059	31.890	25.826	8.713.953
1.	Sulawesi Utara	630.351	739.339	315.495	232.312	14.875	13.966	1.915.768
2.	Sulawesi Tengah	544.427	497.418	133.172	92.937	3.479	3.918	1.294.451
3.	Sulawesi Tenggara	421.278	382.269	184.569	73.115	4.410	2.873	987.786
4.	Sulawesi Selatan	2.686.322	1.512.662	555.941	476.629	41.643	45.47	5.318.670
5.	Maluku	468.508	516.473	162.743	128.312	18.898	4.254	1.298.388
6.	Nusa Tenggara Barat	1.422.684	576.122	179.575	168.063	18.998	18.438	2.367.284
7.	Nusa Tenggara Timur	1.311.818	793.700	188.218	144.632	14.888	9.538	2.462.778
8.	Irian Jaya	614.534	273.855	116.136	97.819	18.114	6.542	1.119.842
IBT (1998)		8.069.944	5.212.878	1.775.843	1.412.918	189.389	96.286	16.676.879
Laju Pertumbuhan (1928 - 1998)		5,36	7,36	9,87	18,9	13,39	14,41	6,71

Sumber : BPS, Penduduk Indonesia 1980 (Data diolah)
Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1998 (Data diolah).

Pada setiap jenis sekolah dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun jumlah yang tidak atau belum tamat Sekolah Dasar juga menalami peningkatan, tetapi ini cukup rendah bila dibandingkan

dengan yang tammat sekolah lanjutan dan PT.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan semakin besar. Bahkan tammatan tingkat Universitas mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu rata-rata sebesar 14,41 persen per tahun, disusul tingkat Akademik/Diploma sebesar rata-rata 13,09 persen per tahun.

Peningkatan luaran pendidikan berarti juga sebagai peningkatan angkatan kerja terdidik, yang pada gilirannya akan memasuki lapangan kerja.

BAB IV P E M B A H A S A N

4.1 Elastisitas Kesempatan Kerja Indonesia Bagian Timur

4.1.1 Kesempatan Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja

Kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaann mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini bukan hanya karena tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga karena pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Pendapatan ini selanjutnya akan dapat menimbulkan pasar dan inilah memungkinkan pertumbuhan ekonomi.

Dari itu dapat dikatakan bahwa tenaga kerja mempunyai dua fungsi, pertama sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa; kedua sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi ini merupakan dua syarat yang sama mutlaknya untuk pertumbuhan ekonomi kawasan ini.

Dalam teori ekonomi makro sering digunakan model siklus rumah tangga dan perusahaan untuk menjelaskan proses ekonomi dalam masyarakat. Untuk menyederhanakan analisa, masyarakat hanya terdiri dari dua pihak yaitu rumah tangga dan perusahaan. Untuk menjalankan proses

produksi barang dan jasa, perusahaan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga dan sebaliknya sebagai imbalannya perusahaan memberikan pendapatan dalam bentuk upah. Dengan demikian lahirlah pasar kerja. Sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya rumah tangga sebagai konsumen akan membeli barang dan jasa dari perusahaan. Dengan demikian lahirlah pasar barang dan jasa.

Para pakar ekonomi mengatakan bahwa apabila terjadi gangguan dalam siklus ini akan terjadi stagnasi dalam perekonomian. Dalam pembangunan kita berusaha mempercepat dan memperbesar arus tersebut, meningkatkan mutu barang dan jasa yang dihasilkan serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang harus melaksanakan proses produksi. Dari dua rumah tangga yaitu rumah tangga konsumen dan produsen itu akan melahirkan pasar barang dan pasar tenaga kerja. Kedua pasar yang terakhir ini tidak dapat dipisahkan. Perluasan kesempatan kerja tidak dapat ditinggalkan dalam pembangunan, bukan hanya karena tenaga kerja diperlukan dalam proses produksi disamping sumber-sumber lain, akan tetapi perlu pula karena tenaga kerja sebagai penghasil pendapatan dan daya beli bagi keluarganya dan masyarakat yang dapat menimbulkan pasar barang.

Karena adanya dua fungsi tenaga kerja sebagai sumber energi yang diperlukan dalam proses produksi dan sebagai kekuatan yang dapat menimbulkan pasar barang, maka

selayaknya apabila kesempatan kerja di Indonesia Bagian Timur lebih ditingkatkan.

Dalam menuju sasaran perluasan kesempatan kerja tersebut maka berbagai upaya perlu dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah ini. Misalnya dengan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mampu memperluas kesempatan kerja, kesempatan untuk berusaha serta meningkatkan penghasilan.
2. Mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia, menggalakkan inovasi dan kreativitas.
3. Dapat dikelola oleh masyarakat setempat.
4. Selaras dengan politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan setempat.

Dengan demikian kiranya, bahwa penciptaan kesempatan kerja bukan hanya sekedar menciptakan kesempatan kerja pada khususnya, tetapi sekaligus juga meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bekerja lebih produktif menciptakan nilai tambah dan menjamin produksi yang lebih baik dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Dalam hubungannya dengan perluasan kesempatan kerja beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Peningkatan produksi melalui proyek - proyek pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung harus memberikan dampak positif terhadap

perluasan kesempatan kerja, kegiatan industri besar padat modal hanya dapat dibenarkan selama menjamin terciptanya kesempatan kerja pada industri kecil yang padat karya.

- Pola investasi harus lebih memprioritaskan pada penciptaan kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Peningkatan produksi sumber daya manusia sebagai angkatan kerja harus dapat ditingkatkan baik melalui jalan pendidikan formal maupun non-formal, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, termasuk latihan-latihan yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.
- Dalam usaha agar laju pertumbuhan angkatan kerja dapat seimbang dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja sehingga pengangguran dapat ditekan.

Pendekatan ini merupakan alternatif penyelesaian permasalahan angkatan kerja, yang semakin meningkat setiap saat. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk setiap waktu.

Sampai seberapa angkatan kerja dapat diserap ke dalam pekerjaan kita akan lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Angkatan Kerja Yang Sedang Bekerja
Dan Yang Masih Menganggur tahun 1990

No.	Propinsi	Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja
		Bekerja	M e n g a n g g u r		
			Sudah Pernah Bekerja	Belum Pernah Bekerja	
1.	Sulawesi Utara	1.037.430	5.970	28.634	1.072.034
2.	Sulawesi Tengah	733.336	1.557	15.589	750.482
3.	Sulawesi Tenggara	539.542	2.959	4.665	547.166
4.	Sulawesi Selatan	2.556.736	10.660	51.492	2.618.888
5.	Maluku	620.995	1.084	14.119	636.198
6.	Nusa Tenggara Barat	1.433.805	4.335	9.224	1.447.364
7.	Nusa Tenggara Timur	1.647.274	4.565	6.273	1.658.122
8.	Irian Jaya	680.007	3.883	17.865	700.955
	I B T	9.249.125	34.213	147.861	9.431.199

Suaber : RPS ; Angkatan Kerja Indonesia 1990, Hal.100, tabel 06.9

Meskipun proporsi angkatan kerja masih lebih besar yang bekerja dari yang menganggur tetapi masih menjadi masalah besar dalam proses pembangunan. Salah satu pertanyaan yang timbul. Sampai berapa tingkat produktivitas jumlah yang sebanyak 9.249.125 jiwa itu ? Ini kita akan lihat di belakang.

Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja di atas terbagi kedalam 10 lapangan kerja. Agar supaya pemahaman kita jelas tentang penggunaan tenaga kerja IBT. Pada tabel 4.3 kita akan melihat sampai sejauh mana pertumbuhan penggunaan tenaga kerja ke dalam 10 kelompok lapangan usaha.

Angka pertumbuhan penggunaan tenaga kerja selama 10 tahun (1980 - 1990) IBT rata-rata 5,12 persen pertahun, dimana penggunaan tenaga kerja yang paling meningkat yaitu pada lapangan usaha listrik, gas dan air sebesar 7,92 persen per tahun. Sedang lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar yaitu lapangan usaha yang masuk kelompok lain-lain sebesar -7,92 persen per tahun.

Nampaknya sektor bangunan juga mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 1,39 persen per tahun. Demikian juga lapangan usaha yang masuk kelompok delapan (keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, tanah dan jasa perusahaan) mengalami penurunan sebesar 1,94 persen per tahun.

Penurunan penggunaan tenaga kerja pada tiga kelompok lapangan usaha di atas boleh jadi erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang mengakibatkan hemat pekerjaan, misalnya penggunaan komputer, traktor, mesin cuci dan lain-lain.

4.1.2 Pertumbuhan PDRB Indonesia Bagian Timur

Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Indonesia Bagian Timur tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dari wilayah ini. PDRB adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah. Penyajian Produk Domestik Regional Bruto

dapat dilakukan menurut lapangan usaha (sektor ekonomi), menurut besarnya andil faktor produksi dan menurut penggunaan akhir.

Pada tulisan ini penyajian angka PDRB hanya dilihat menurut lapangan usaha untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi dari masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB di IBT.

Pada tabel lampiran 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 1980 sampai tahun 1990 kontribusi sektor peranian tetap menduduki ranking pertama terhadap pembentukan total PDRB di kawasan Timur Indonesia.

Tetapi walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya namun terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata tiap tahun rendah yaitu 5,60 persen. Lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan kontribusi sektor pertambangan yang hanya 2,06 persen tiap tahun.

Apabila dilihat dari besar laju pertumbuhan maka yang terbesar adalah industri pengolahan dari Rp 126.827 juta menjadi Rp 457.947 juta pada tahun 1990 atau meningkat rata-rata 13,70 persen tiap tahun.

4.1.3 Elastisitas Kesempatan Kerja Indonesia Bagian Timur

Elastisitas kesempatan kerja IBT dapat dilihat dari seluruh sektor perekonomian atau menurut sektor lapangan usaha. Oleh karena itu berdasarkan konsep elastisitas

kesempatan kerja yang dikemukakan pada modal analisis sebelumnya maka diperoleh elastisitas kesempatan kerja Indonesia Bagian Timur (E_{IBT}) sebagai berikut :

$$E_{IBT} = \frac{5,12}{7,39}$$

$$= 0,69$$

Elastisitas kesempatan kerja IBT ($E_{IBT} = 0,69$) ini berarti bahwa apabila PDRB Riel Indonesia Bagian Timur bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan adalah 0,69 persen.

Selanjutnya elastisitas kesempatan kerja untuk masing-masing sektor lapangan usaha dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Elastisitas kesempatan kerja sektor pertanian sebesar 1,04 ($E_{pt} = 1,04$), ini berarti bahwa apabila PDRB sektor pertanian bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan di sektor pertanian untuk itu adalah 1,04 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja terhadap PDRB pada sektor ini menunjukkan perkiraan yang elastis karena koefisien elastisitasnya lebih dari satu ($E_{pt} > 1$).

Keadaan elastisitas kesempatan kerja sektor pertanian yang demikian karena laju pertumbuhan PDRB

riel lebih kecil dari pada pertumbuhan penggunaan tenaga kerja pada sektor ini, dimana laju pertumbuhan PDRB riel sektor pertanian sebesar 5,60 % pertahun, sedangkan laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja 5,58 persen per tahun. Laju pertumbuhan PDRB riel dan laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja hampir sama, ini disebabkan bahwa keseluruhan IBT (kecuali Timur-Timur) merupakan areal pertanian yang luas dan masih banyak yang belum dimanfaatkan sehingga cukup elastis terhadap perubahan satu unit PDRB riel.

Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan merupakan lapangan kerja yang tersedia untuk menyerap angkatan kerja yang belum bekerja di wilayah ini.

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Elastisitas kesempatan kerja sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,48 persen ($EPP = 1,48$), ini berarti bahwa apabila PDRB riel sektor pertambangan bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan disektor pertambangan dan penggalian adalah 1,48 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor ini adalah elastis karena koefisien elastisitasnya lebih besar dari satu ($E_{pp} > 1$).

Elastisitas yang demikian disebabkan karena sektor ini masih merupakan sektor yang padat karya.

c. Sektor Industri Pengolahan.

Elastisitas kesempatan kerja sektor industri adalah sebesar 0,22 persen ($E_{id} = 0,22$), ini berarti bahwa apabila PDRB sektor industri bertambah dengan satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan di sektor industri untuk itu adalah 0,22 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor industri tersebut adalah kurang elastis karena koefisien elastisitasnya adalah kurang dari satu ($E_{id} < 1$).

Elastisitas yang lebih kecil satu, karena laju pertumbuhan PDRB riil yaitu 13,70 lebih besar dari laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja yang sebesar 2,96 persen per tahun.

Laju pertumbuhan sektor industri menunjukkan bahwa sektor industri telah tumbuh lebih pesat dari segi nilai tambah daripada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini disebabkan oleh karena prouktivitas kerja rata-rata di sektor industri telah tumbuh dengan pesat karena telah didukun oleh teknologi. Sehingga kecenderungan sektor ini lebih padat modal dan kurang pemanfaatan tenaga kerja.

d. Sektor Listrik, Gas, Air Minum

Elastisitas kesempatan kerja sektor Listrik, Gas, dan Air minum adalah sebesar 0,70 ($E_{lg} = 0,70$), ini berarti bahwa apabila PDRB sektor listrik, gas dan

air minum bertambah dengan satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan di sektor listrik, gas dan air minum untuk itu adalah 0,70 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor listrik, gas dan air minum menunjukkan perkiraan yang inelastis, karena koefisien elastisitas kurang dari satu ($E_{lg} < 1$).

Salah satu yang menyebabkan keadaan tersebut di atas adalah karena beberapa instalasi kecil telah diganti fungsi oleh instalasi besar yang padat modal, misalnya penggunaan pembangkit listrik tenaga air yang berkapasitas ratusan Watt misalnya di Sulawesi Selatan yang terdapat di Bakaru dan Larona (INCO).

e. Sektor Bangunan.

Elastisitas kesempatan kerja sektor bangunan sebesar $-0,18$ ($E_{bg} = -0,18$), ini berarti bahwa apabila PDRB riil sektor bangunan meningkat satu persen, kesempatan kerja yang diciptakan menurun sebesar 0,18 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor bangunan tersebut menunjukkan perkiraan yang inelastis karena koefisien elastisitas lebih kecil dari satu ($E_{bg} < 1$).

Keadaan elastisitas kesempatan kerja yang demikian erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang cenderung mengganti tenaga manusia dengan peralatan-peralatan untuk menggerakkan sektor ini.

f. Sektor Perdagangan dan Rumah Makan.

Elastisitas kesempatan kerja sektor perdagangan sebesar 0,89 persen ($E_{pd} = 0,89$), ini berarti bahwa apabila PDRB riil sektor perdagangan bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan disektor perdagangan bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan disektor perdagangan untuk itu adalah 0,89 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor perdagangan tersebut menunjukkan perkiraan yang kurang elastis, karena koefisien elastisitasnya kurang dari satu ($E_{pd} < 1$).

Keadaan demikian disebabkan karena perkembangan yang lebih pesat pada sektor perdagangan besar yang padat modal dibandingkan dengan sektor perdagangan kecil yang berupa usaha kecil, tradisional dan sektor informal yang memiliki peranan penting dalam menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

g. Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi.

Elastisitas kesempatan kerja sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi sebesar 0,37 persen ($E_{ak} = 0,37$), ini berarti bahwa apabila PDRB riil sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan disektor ini adalah 0,37 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi



tersebut menunjukkan perkiraan yang kurang inelastis, karena koefisien elastisitasnya lebih kecil dari satu ($E_{ak} > 1$).

Faktor yang menyebabkan hal tersebut karena produktivitas rata-rata disektor angkutan, pergudangan dan komunikasi meningkat, dan menghasilkan nilai tambah yang meningkat pula sedangkan penyerapan tenaga kerja berjalan lambat.

h. Sektor Keuangan, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan.

Elastisitas kesempatan kerja sektor keuangan dan usaha persewaan kurang $-0,26$ ($E_{kp} = -0,26$), ini berarti bahwa apabila PDRB riil sektor keuangan bertambah satu persen, akan menurunkan kesempatan kerja yang dapat diciptakan sektor tersebut sebesar $-0,26$ persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor keuangan tersebut menunjukkan perkiraan yang inelastis ($E_{kp} < 1$).

Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut karena sektor keuangan semakin intensip modal, misalnya penggunaan komputer untuk mengganti pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh tenaga manusia.

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan.

Elastisitas kesempatan kerja sektor jasa kemasyarakatan adalah sebesar $0,52$ ($E_{jk} = 0,52$), ini be-

rarti bahwa apabila PDRB riil sektor jasa kemasyarakatan bertambah satu persen, kesempatan kerja yang dapat diciptakan disektor tersebut adalah 0,52 persen. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja sektor tersebut adalah kurang elastis, karena koefisien elastisitasnya kurang dari satu ($E_{jk} < 1$).

Faktor yang menyebabkan bisa jadi karena sektor jasa kemasyarakatan adalah faktor penunjang sektor lain sehingga kecenderungan sektor lain yang kurang elastis di atas berpengaruh pula pada sektor ini.

j. Sektor Lainnya.

Sektor ini nampaknya tidak bisa dianalisis karena Biro Statistik menganalisa PDRB tidak mencantumkan sektor lain-lain.

Elastisitas kesempatan kerja dari berbagai sektor lapangan usaha yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel 4.2. Dalam tabel tersebut nampak bahwa hanya ada dua lapangan usaha yang elastis. Yaitu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Masing-masing sebesar 1,04 dan 1,48.

Tabel 4.2. Elastisitas Kesempatan Kerja di IBT Tahun 1980 - 1990

No.	Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB Riil (g) %	Laju Pertumbuhan Penggunaan TK. (n) %	Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (e) %
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5,68	5,85	1,04
2.	Pertambangan & Penggalian	2,06	3,04	1,48
3.	Industri Pengolahan	13,70	2,96	0,22
4.	Listrik, Gas & Air Minum	11,40	7,92	0,70
5.	Bangunan	7,90	-1,39	-0,18
6.	Perd. Besar, Eceran dan Rumah Makan	6,70	5,98	0,89
7.	Angkutan, Pergud. & Komunikasi	8,10	3,02	0,37
8.	Keuangan, Usaha Persewaan, Bangunan, Tana dan Jasa Perusahaan	7,40	-1,94	-0,26
9.	Jasa Kenayarakatan	7,39	3,82	0,52
10.	Lainnya	-	-7,29	-
	Jumlah	7,39	5,12	0,69

Sumber : Diolah Berdasarkan tabel laopiran 1.

4.2 Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Bagian Timur.

Untuk definisi kerja, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang dipergunakan per satuan waktu. Sumber daya masukan dapat terdiri dari beberapa faktor produksi seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, bahan mentah, dan sumber daya manusia.

Karena pada dasarnya pendapatan masyarakat, yang biasa disebut produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh semua

orang yang bekerja, sehingga produktivitas kerja adalah jumlah PDRB yang dihasilkan pada satuan waktu dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada satuan waktu yang sama (biasanya satu tahun). Jadi pengertian produktivitas tenaga kerja, hampir sama dengan pendapatan perkapita. Hanya dalam pendapatan perkapita PDRB dibagi dengan jumlah penduduk tanpa memperhatikan apakah bekerja atau tidak.

Untuk mengetahui seberapa besar produktivitas tenaga kerja di IBI pada tabel lampiran 1 Kita dapat melihat menurut lapangan usaha yang diuraikan sebagai berikut :

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Produktivitas pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan nampaknya mengalami penurunan. Pada tahun 1980 PDRB tiap pekerja sebesar Rp 528.864 dan pada tahun 1990 hanya sebesar Rp 516.516 PDRB-nya tiap pekerja, atau meurun sebesar Rp 12.348 tiap pekerja.

Salah satu sebab penurunan ini adalah meningkatnya penggunaan tenaga kerja. Tahun 1980 sektor ini mempekerjakan 3.621.843 orang meningkat menjadi 6.394.830 orang pada tahun 1990.

b. Pertambangan dan Penggalan.

Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalan mengalami penurunan. Pada

tahun 1980 PDRB tiap pekerja sebesar Rp 11.161.877 menurun menjadi Rp 10.145.462 per pekerja.

Penurunan ini disebabkan oleh proporsi peningkatan tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini lebih besar dari proporsi PDRB yang dihasilkan. Tahun 1980 sektor ini mempekerjakan 35.737 orang dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 48.198.

c. Industri Pengolahan.

Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan meningkat. Pada tahun 1980 PDRB tiap pekerja sebesar Rp 385.002 menjadi Rp 768.896 per pekerja pada tahun 1990, atau meningkat sebesar Rp 483.894 per tenaga kerja.

Laju kenaikan PDRB pada sektor ini lebih besar dari penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini pada tahun 1980 adalah 445.004 orang. Sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 595.590 orang.

d. Listrik, Gas dan Air Minum.

Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha listrik, gas dan air minum meningkat. Pada tahun 1980 PDRB tiap pekerja sebesar Rp 4.632.195 pada tahun 1990 menjadi Rp 6.360.595 tiap pekerja, atau meningkat sebesar Rp 1.728.400 tiap pekerja.

Laju kenaikan PDRB pada sektor ini lebih besar dari

penyerapan tenaga kerja jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini pada tahun 1980 adalah 4.951 orang, pada tahun 1990 sebesar 10.613 orang.

e. Bangunan.

Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha bangunan meningkat. Pada tahun 1980 PDRB per pekerja sebesar Rp 1.154.295, menjadi pada tahun 1990 sebesar Rp 2.839.836 per pekerja atau meningkat sebesar Rp 1.685.541 per pekerja.

Laju kenaikan PDRB pada sektor ini lebih besar dari penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini pada tahun 1980 adalah 153.706 orang, meningkat pada tahun 1990 menjadi 133.638 orang.

f. Perdagangan dan Rumah Makan.

Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan, meliputi perdagangan besar, eceran dan rumah makan nampaknya mengalami peningkatan. Pada tahun 1980 PDRB tiap pekerja sebesar Rp 644.906 menjadi Rp 1.233.505 per pekerja pada tahun 1990 atau meningkat sebesar Rp 588.599 per pekerja.

Laju kenaikan PDRB pada sektor ini lebih besar dari penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang mencari penghasilan pada sektor ini 468.823 orang pada tahun 1980. Dan 838.120 orang pada tahun 1990.

g. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi

Produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan. Pada tahun 1980 PDRB tiap pekerja berjumlah Rp 2.803.334, meningkat pada tahun 1990 menjadi Rp 4.533.828 per tenaga kerja, atau meningkat Rp 1.730.494 per pekerja.

Tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor ini tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Pada tahun 1980 jumlah orang yang bekerja pada lapangan ini sebanyak 125.523 orang, pada tahun 1990 hanya menjadi 169.118 orang.

h. Lembaga keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Produktivitas tenaga kerja pada sektor lembaga keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan juga meningkat. Pada tahun 1980 PDRB per tenaga kerja sebanyak Rp 7.671.618, meningkat pada tahun 1990 menjadi Rp 19.053.647 per tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada lapangan ini menurun pada tahun 1980 sebanyak 25.915 orang, menjadi 21.306 orang, atau menurun sebanyak 4.609 orang.

i. Jasa Kemasyarakatan.

Produktivitas tenaga kerja pada sektor jasa kemasyarakatan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1980 PDRB per tenaga kerja sebesar Rp 869.750, meningkat pada tahun 1990 menjadi Rp 1.132.630 per tenaga kerja, atau meningkat sebesar Rp 262.880 per pekerja.

Jumlah tenaga kerja yang mencari penghidupan pada sektor ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 1980 jumlah pekerja sebanyak 709.053 orang, meningkat pada tahun 1990 menjadi 1.031.708 orang, atau bertambah sebesar 322.655 orang.

Angka di atas menunjukkan produktivitas yang cukup tinggi. Beberapa lapangan usaha malah dapat lebih 10 juta per tenaga kerja. Tetapi seberapa besarkah pemerataan penghasilan di atas? Dan berapa banyak uang yang ditransfer ke luar kawasan ini misalnya Indonesia Barat? Hal ini di luar kemampuan penulis untuk memaparkan pada kesempatan ini.

4.3 Target Pertumbuhan Ekonomi Untuk Menurunkan Pengangguran dan Menaikkan Tingkat Pendapatan

Masalah ekonomi pokok yang dihadapi oleh Indonesia Bagian Timur ialah pendapatan yang rendah dan tidak merata serta pengangguran dan setengah pengangguran yang besar. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan dewasa ini pertanyaan yang pertama-tama timbul ialah berapakah tinggi laju pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) yang seharusnya ditargetkan, agar tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat rata-rata dapat ditingkatkan. Hendaknya diingat di sini, bahwa target perlu ditetapiakan dulu sebelum dapat dipikirkan cara

pemerataannya. Formulasi. Drs. Soeroto, MA (1986) dapat dipergunakan untuk menetapkan berapa besar target pertumbuhan ekonomi (PDRB). Formulasi itu dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = N \times Q \dots\dots\dots 1$$

dimana Y adalah PDRB, N adalah jumlah orang yang bekerja dan Q adalah pendapatan rata-rata tiap orang yang bekerja tiap tahun atau produktivitas kerja. Di samping itu pendapatan rata-rata tiap orang yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, menurut definisinya adalah :

$$Q = \frac{Y}{N} \dots\dots\dots 2$$

Selanjutnya formulasi itu Soeroto kembangkan dengan menghitung masing-masing laju pertumbuhan sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto :

$$Y_t = Y_0 (1 + g)^t \dots\dots\dots 3$$

Jumlah penggunaan tenaga kerja:

$$N_t = N_0 (1 + n)^t \dots\dots\dots 4$$

Produktivitas kerja :

$$Q_t = Q_0 (1 + q)^t \dots\dots\dots 5$$

Y_0 = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun dasar

Y_t = Produk Domestik Bruto pada tahun t

g = Laju pertumbuhan produk domestik bruto

N_0 = Jumlah penggunaan tenaga kerja pada tahun dasar

N_t = Jumlah penggunaan tenaga kerja pada tahun t

n = Laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja

Q_0 = Produktivitas kerja pada tahun awal

Q_t = Produktivitas kerja pada tahun t

q = Laju pertumbuhan produktivitas kerja.

Berdasarkan Definisi Di atas, maka :

$$Q_t = \frac{Y_0 (1 + q)^t}{N_0 (1 + n)^t} \quad \text{atau}$$

$$Q_0 \times (1 + q)^t = \frac{Y_0 (1 + q)^t}{N_0 (1 + n)^t} \quad \dots\dots\dots 6$$

Dari rumus 2, maka :

$$Q_0 = \frac{Y_0}{N_0}, \text{ karenanya rumus 6, menjadi}$$

$$Q_0 (1 + q)^t = Q_0 \frac{(1 + q)^t}{(1 + n)^t} \quad \text{atau}$$

$$(1 + q)^t = \frac{(1 + q)^t}{(1 + n)^t}$$

$$(1 + g)^t = (1 + q)^t (1 + n)^t$$

$$(1 + g) = (1 + q) (1 + n)$$

$$(1 + g) = (1 + n + q + nq)$$

$$g = n + q + nq \dots\dots\dots 7$$

Selanjutnya dari rumus 7 di atas Soeroto (1986) kembangkan yang modelnya dituliskan sebagai berikut :

P_0 = Jumlah Penduduk dalam tahun dasar

P_t = Jumlah Penduduk dalam tahun t

g = Laju pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun

Y_0 = Jumlah produk Domestik Regional Bruto dalam tahun dasar

Y_t = Jumlah produk Domestik Regional Bruto dalam tahun t

q = Laju pertumbuhan PDRB yang menjadi terget

A_0 = Jumlah angkatan kerja dalam tahun dasar

A_t = Jumlah angkatan kerja dalam tahun t

a = Laju pertumbuhan angkatan kerja tiap tahun.

N_0 = Jumlah penggunaan tenaga kerja dalam tahun dasar

N_t = Jumlah penggunaan tenaga kerja dalam tahun t

n = Laju pertumbuhan jumlah penggunaan tenaga kerja.

$$\left(\frac{Y}{P}\right)_0 = \text{PDRB per kapita dalam tahun dasar.}$$

$$\left(\frac{Y}{P}\right)_t = \text{PDRB per kapita dalam tahun t.}$$

$\left(\frac{N}{A}\right)_0$ = Tingkat penggunaan tenaga kerja dalam tahun dasar.

$\left(\frac{N}{A}\right)_t$ = Tingkat penggunaan tenaga kerja dalam tahun t.

Selanjutnya untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi PDRB diperlukan dua syarat (constraints) yang harus dipenuhi.

Pertama, karena salah satu tujuan pembangunan ialah peningkatan pendapatan per kapita, maka :

$$\left(\frac{Y}{P}\right)_0 < \left(\frac{Y}{P}\right)_t$$

$$\frac{Y_0}{P_0} < \frac{Y_0 (1 + g)^t}{P_0 (1 + P)^t}$$

$$1 < \frac{Y_0 (1 + g)^t}{P_0 (1 + P)^t} \quad \text{atau}$$

$$1 < \frac{Y_0 (1 + g)}{P_0 (1 + P)}$$

$$(1 + P) < (1 + g)$$

$$P < g \quad \dots\dots\dots 8$$

Kedua, Tujuan pembangunan yang kedua adalah pengurangan tingkat pengangguran, ini berarti pula bahwa tingkat

penggunaan tenaga kerja harus meningkat, maka :

$$\left(\frac{N}{A}\right)_0 < \left(\frac{N}{A}\right)_t$$

$$\frac{N_0}{A_0} < \frac{N_0 (1+n)^t}{A_0 (1+a)^t}$$

$$1 < \frac{(1+n)^t}{(1+a)^t} \quad \text{atau}$$

$$1 < \frac{(1+n)}{(1+a)}$$

$$(1+a) < (1+n)$$

$$a < n \quad \dots\dots\dots 9$$

Besarnya target pertumbuhan ekonomi g dalam rumus 7 ditentukan :

$$g = n + q + nq$$

Karena $n > a$,

maka

$$n + q + nq > a + q + aq, \text{ karena } (n + q + nq) = g$$

maka

$$g > a + q + aq, \dots\dots\dots 10$$

Dengan ini dapat dituliskan bahwa agar tingkat pendapatan perkapita dapat meningkat dan tingkat pengangguran dapat

menurun maka target laju pertumbuhan produk domestik bruto (g) harus memenuhi dua syarat di atas.

Ini berarti bahwa target laju pertumbuhan PDRB yang harus diwujudkan ialah harus lebih besar dari jumlah laju pertumbuhan angkatan kerja ditambah laju pertumbuhan produktivitas kerja ditambah hasil ganda kedua suku ini. Di samping itu laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja (n) harus lebih besar dari laju pertumbuhan angkatan kerja (a). Jika ini dapat diwujudkan baru ada kemungkinan pendapatan perkapita dapat meningkat dan tingkat pengangguran dapat menurun.

Formulasi di atas diterapkan untuk IBT. Dalam tabel lampiran 1 disajikan angka-angka penggunaan tenaga kerja data tahun 1988 dan data tahun 1990 dan angka PDRB tahun yang bersangkutan serta laju pertumbuhannya.

Hasil perhitungan laju pertumbuhan PDRB dengan rumus 7 dibandingkan dengan perhitungan langsung ternyata sama. Dari tabel tersebut diketahui bahwa laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja yang tertinggi adalah lapangan usaha listrik, gas dan air minum sebesar 7,92 % dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 11,40 % dan laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja yang negatif adalah sektor bangunan yaitu -1,39 % dan lembaga keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebesar -1,98 % tiap tahun. Mungkin hal ini disebabkan karena penggantian tenaga manusia

dengan alat-alat teknologi. Laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja yang tertinggi kedua adalah sektor perdagangan dan rumah makan sebesar 5,98 % dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,7 %. Sektor pertanian laju pertumbuhan penggunaan tenaga kerja sebesar 5,85 % dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,60 %, sektor ini juga merupakan penyerap tenaga kerja paling besar yaitu 3.621.843 orang pada tahun 1980 meningkat pada tahun 1990 menjadi 6.394.830 orang. Karena pengaruh sektor pertanian cukup besar sehingga laju penggunaan tenaga kerja untuk IBT sebesar 5,12 % sedangkan laju PDRB sebesar 7,39 % tiap tahun.

Jumlah penduduk IBT (tanpa Timur-Timur) tahun 1980 adalah 18.456.000 jiwa dalam tahun 1990 meningkat menjadi 22.665.000 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja dari 5.715.313 menjadi 9.431.197 dalam kurung waktu yang sama. Laju pertumbuhan penduduk (P) ada sebesar 2,08 % tiap tahun dan laju pertumbuhan angkatan kerja (a) sebesar 5,14%. Dari tabel lampiran 1 diketahui (q) sebesar 2,16 %, Dengan demikian maka besar rumus $a + q + a q = 7,41 \%$, sedangkan $g = 7,39 \%$ masih lebih kecil dari target minimum yaitu 7,41 %. Berdasarkan formulasi yang telah dirumuskan di atas maka laju pertumbuhan PDRB yang 7,39 % belum dapat memecahkan masalah pengangguran.

agar angkatan kerja dapat tersalurkan. Pembukaan lapangan kerja baru dengan penggunaan tenaga kerja yang padat karya mutlak diperlukan. Dengan adanya perbedaan yang tidak begitu besar memang pada dasarnya angkatan kerja yang sudah bekerja sudah 98,03 %.

Namun setengah pengangguran atau penganggur tidak kentara serta produktivitas yang rendah oleh sebahagian besar penduduk kawasan ini dan juga ketimpangan pendapatan merupakan masalah mendasar yang dihadapi Indonesia Bagian Timur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada Bab I bagian 1.1.3 telah dikemukakan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu (1) membandingkan angkatan kerja dan tenaga kerja sehingga dapat memberikan gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), (2) memberikan gambaran angkatan kerja yang berada di IBT mengenai tingkat produktivitasnya, (3) meninjau lebih jauh masalah-masalah angkatan kerja dalam rangka pengambilan kebijaksanaan kesempatan kerja dan, (4) memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam usaha perluasan kesempatan kerja yang cukup memungkinkan terserapnya angkatan kerja yang lebih banyak dalam bidang pekerjaan produktif.

Berdasarkan analisis studi ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di IBT pada tahun 1980 rata-rata 46,31 %, pada tahun 1990 meningkat menjadi 57,58 %. Hal ini berarti bahwa pada tahun 1980 proporsi angkatan kerja lebih kecil dari seluruh penduduk usia tenaga kerja. Pada tahun 1990 terjadi peningkatan proporsi angkatan kerja dari total tenaga kerja.

2. Tingkat produktivitas tenaga kerja di IBT pada tahun 1980 sebesar Rp 722.291 per tenaga kerja. Pada tahun 1990 meningkat menjadi Rp 894.327 per pekerja. Hal ini bervariasi menurut lapangan usaha. Untuk meningkatkan produktivitas kerja sangat diperlukan peningkatan pendidikan dan keterampilan yang baik dan berkualitas yang tentunya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
3. Pendidikan formal sangat penting untuk menjadi modal pembangunan sebab dapat menghilangkan buta huruf, meningkatkan kecerdasan namun sekaligus menjadi beban pembangunan bila tidak terserap dalam lapangan kerja sehingga muncul penganggur berpendidikan.
4. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan formulasi Soeroto diperoleh $g < a + q + a q$. Hal ini berarti bahwa laju penyerapan angkatan kerja lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu peningkatan penyerapan tenaga kerja.

5.2 Saran-Saran

Untuk selanjutnya, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diarahkan penyebaran tenaga kerja baik ke berbagai sektor maupun berbagai region secara merata. Untuk itu pendidikan dan keterampilan tenaga kerja harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.

2. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perlu diprioritaskan pada pembangunan yang bersifat padat karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakir, Zainab dan Chris Manning (ed). 1986. *Angkatan Kerja di Indonesia, Kesempatan, dan Pengangguran*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Kusumosuwindho, S. 1981. *Sajian Dasar : Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Papayungan, M.M. 1986. *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Konsep-konsep Dasar dan Masalah Kesempatan Kerja di Negara Sedang Berkembang*. PPSK LP-UNHAS, Ujung Pandang.
- Rodolf, H.S. 1983. *Yang Melimpah dan Yang Merana*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Samuelson, P.A. dan William D.N. *Ekonomi*. Edisi Keduabelas, Diterjemahkan oleh Jaka Wasana, Erlangga, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LP. FE-UI, Jakarta.
- Soediono, 1983. *Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Lyberty, Yogyakarta.
- Soeroto, MA. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sudarsono. 1983. *Pengantar Ekonomi Mikro*. LP3ES, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1989. *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah Dasar Kebijaksanaan*. Borta Gorat, Medan.
- Swasono, Y. dan Endang Sulistianingsih. 1983. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. BPEE - Yogyakarta, Yogyakarta.
- Todaro, M.P. 1987. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketiga, Diterjemahkan Oleh Burhanuddin Abdullah, Erlangga, Jakarta.
- Wirosuhardjo, Kartomo. 1981. *Dasar-Dasar Demografi*, FE-UI, Jakarta.

TERBITAN PEMERINTAH, MAKALAH, MAJALAH, DAN ARTIKEL :

- Agung, Ingusti Ngurah. 1991. *Persebaran Penduduk Pada Tahap Pembangunan Jangka Panjang Kedua*. Serasi, Warta Kependudukan Dan Lingkungan Hidup, No. 19 Tahun 1991.
- Biro Pusat Statistik. 1980. *Penduduk Indonesia 1980*. BPS Jakarta.
- . 1981. *Penduduk Indonesia 1990*. BPS Jakarta.
- . 1991. *Statistik Indonesia 1980/1981*. BPS Jakarta.
- . 1990. *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1990*. BPS Jakarta.
- . 1990. *Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi Menurut Lapangan Usaha : 1983-1990*.
- Burhamzah, Prof. Dr. 1990. *Masalah Kesenjangan Antar Daerah dan Membangun Kewira Usahawan Dan Manajemen*. Pi-dato disampaikan pada acara wisuda dan Dies Natalis XVI STIE-YPUP.
- Panetto Abdul Rahman, DR. --- . *Pembangunan Ekonomi dan Prospeknya di Indonesia Timur*.